

Sewa Gedung DPRD KKR Segera Dibayar

Widi Aryadi

Borneo Tribune, *Sungai Raya*

Niat Anggota DPRD Kubu Raya hendak 'berkemah' batal. Pasca polemik dan proses cukup panjang akhirnya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Sekretariat Daerah dalam waktu dekat segera mencairkan pembayaran uang sewa beberapa gedung berlantai tiga tersebut.

Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Kubu Raya, Mokhtar memastikan pembayaran gedung tersebut akan segera terlaksana. "Administrasi kontrak sudah selesai. Sekarang tinggal ditransfer dari Dinas Pendapatan Ppengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(DPPKAD) dan dibuatkan Surat Perjanjian Penggunaan Dana (DP2D) yang diberikan ke bank untuk ditransfer ke rekening pemilik gedung. Jadi sekarang ini hanya tinggal proses waktu saja," ungkap Mokhtar dikonfirmasi, Kamis (5/5).

Mokhtar mengakui pembayaran sewa gedung tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 50 Juta, kini menjadi Rp 95 Juta per pintu per tahunnya. Kenaikan harga sewa gedung tersebut dikarenakan adanya permintaan dari pemilik. Dengan melihat beberapa faktor seperti perkembangan daerah tersebut yang memiliki nilai lebih.

"Harga sewanya memang

naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 50 juta per unit per tahunnya dan kini menjadi Rp 95 Juta. Kenaikan itu atas permintaan dari pemilik gedung dengan melihat beberapa faktor seperti perkembangan daerah yang memiliki nilai lebih. Sementara ruko yang dikontrakan berjumlah empat pintu sehingga total sewa kontrak untuk pembayaran gedung DPRD KKR mencapai Rp 360 juta termasuk pajak 10% dari pemilik dan penyewa. Awalnya ketika KKR baru terbentuk pemilik hanya berniat membantu sehingga dikasih murah. Namun sekarang kondisinya sudah berbeda maka si pemilik merasa perlu untuk dinaikan dengan masih sebatas wajar.," jelas



Mokhtar

Mokhtar.

Mokhtar mengatakan untuk pembayaran sewa gedung DPRD KKR tahun berikutnya direncanakan akan dipindahkan ke pos Sekretariat Dewan (Sekwan). "Tidak masalah jika dipindahkan ke pos Sekwan yang terpenting semua berjalan lancar. Dan kita tidak mau hanya gara-gara satu kata atau kalimat bisa menjadi temuan atau permasalahan

di kemudian hari karena itu kami sudah merancang draftnya sebaik mungkin. Sebab di internal eksekutif ada badan auditor seperti inspektorat atau pun BPK yang akan memeriksa keuangan. Karena dalam menyusun draft administrasi pihaknya harus teliti," tambah Mokhtar.

Mokhtar menjelaskan tidak hanya gedung DPRD KKR yang masih berstatus sewa atau kontrak namun hampir seluruh dinas/ badan/ kantor di KKR yang masih kontrak. "Kalau untuk ini keuangannya ada di masing-masing SKPD. Sementara kalau untuk instansi vertikal bukan bagian saya tapi ada di bagian pertanahan," terang Mokhtar. □